

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Program Padat Karya adalah suatu program pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, dengan melibatkan mereka secara langsung dalam kegiatan pembangunan infrastruktur atau kegiatan produktif lainnya yang menggunakan tenaga manusia (tenaga kerja) lebih banyak dibandingkan penggunaan mesin atau teknologi. Di Kota Bandung, program ini telah diimplementasikan di berbagai kelurahan, salah satunya di Kelurahan Cicaheum dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal serta perbaikan lingkungan. Namun, meskipun program ini telah berjalan, masih ditemukan permasalahan seperti menumpuknya sampah di sungai dan tingkat kesejahteraan masyarakat di tempat diimplementasikannya program tersebut.

Penumpukan sampah tersebut dapat dilihat secara langsung ketika peneliti melakukan observasi ke salah satu sungai dari tiga sungai yang dilakukan program yakni sungai Ciparungpung yang melintasi Kelurahan Cicaheum. Selain itu, laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mencatat bahwa sungai di Kelurahan Cicaheum masih termasuk dalam kategori tercemar ringan dan sedang akibat sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik (Wamad, 2023).



Gambar 1.1 Sungai Ciparungpung 9 Juli 2025

Sumber: Hasil observasi peneliti

Padat Karya di Kelurahan Cicaheum sejatinya dialokasikan untuk kegiatan seperti pembersihan saluran air, perbaikan jalan, pembersihan sungai dan penanganan sampah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Program Padat Karya telah dilaksanakan, belum mampu secara optimal memperbaiki kondisi lingkungan.

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung dari tahun 2012 hingga 2024 mengalami perubahan naik dan turun yang tidak terlalu signifikan. Bahkan angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Mengenai data kemiskinan di Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Profil Kemiskinan Kota Bandung

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung

Jumlah penduduk miskin di Kota Bandung pada Maret 2012, jumlahnya mencapai 111,40 ribu jiwa (4,55%), dan pada Maret 2024, turun menjadi 101,10 ribu jiwa (3,87%). Angka terendah tercatat pada Maret 2019, dengan hanya 84,67 ribu jiwa (3,38%). Namun, setelah itu terjadi kenaikan pada Maret 2021

menjadi 112,50 ribu jiwa (4,37%). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,60, turun sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Indeks ini menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilainya, semakin kecil jarak tersebut. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,14, juga turun sebesar 0,01 poin. Indeks ini mencerminkan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin. Penurunan menunjukkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin turut menurun.

Garis Kemiskinan di Kota Bandung pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp614.707 per kapita per bulan. Garis ini meningkat sebesar 3,99% dibandingkan Maret 2023. Artinya, untuk tidak dikategorikan miskin, seseorang harus memiliki pengeluaran minimal sebesar nilai ini tiap bulan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Kota Bandung adalah 3,87%, turun 0,09% dari Maret 2023 yang berada pada 3,96%. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah.

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya tren positif dalam pengurangan kemiskinan di Kota Bandung meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Baik dari sisi jumlah maupun kedalaman dan keparahan kemiskinan, semua indikator menunjukkan penurunan. Namun, meningkatnya garis kemiskinan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar semakin mahal, sehingga tetap dibutuhkan intervensi kebijakan yang efektif agar masyarakat rentan tidak kembali jatuh miskin. Data yang dipublikasikan oleh BPS mencatat bahwa meski ada perbaikan, angka kemiskinan dan pengangguran masih menjadi perhatian serius.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2021 hingga 2023, Kecamatan Kiaracondong selalu menjadi salah satu kecamatan dengan penerima bantuan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terbanyak dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Bandung. Dalam kurun waktu tiga tahun, jumlah penduduk Kecamatan Kiaracondong yang terdaftar dalam DTKS mengalami fluktuasi, yang menunjukkan dinamika sosial ekonomi

masyarakat di wilayah ini. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 46.648 jiwa masuk dalam DTKS. Angka ini menunjukkan bahwa Kiaracondong merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi warga miskin dan rentan miskin yang cukup tinggi di Kota Bandung.

Memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah penduduk DTKS di Kiaracondong, yaitu menjadi 55.799 jiwa. Kenaikan lebih dari 9.000 jiwa ini mengindikasikan beberapa kemungkinan. Namun, pada tahun 2023, jumlah warga yang tercatat dalam DTKS di Kiaracondong menurun sedikit menjadi 55.016 jiwa dan mengalami penurunan sebesar 783 jiwa. Dalam hal peringkat, Kecamatan Kiaracondong secara konsisten menempati posisi 3 besar pada tahun 2021 dan 2022, lalu turun peringkat ke-4 pada tahun 2023 dari total 30 kecamatan di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kiaracondong merupakan salah satu wilayah dengan beban sosial ekonomi tertinggi di Kota Bandung, meskipun terdapat sedikit perbaikan dari sisi jumlah penerima bantuan sosial. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peringkat Jumlah Orang Terdaftar dalam DTKS Kota Bandung berdasarkan Kecamatan

NO	KECAMATAN	2021	KECAMATAN	2022	KECAMATAN	2023
1	Bojongloa Kaler	61.646	Bojongloa Kaler	71.538	Bojongloa Kaler	69.727
2	Babakan Ciparay	55.965	Babakan Ciparay	64.393	Babakan Ciparay	63.932
3	Kiaracondong	46.648	Kiaracondong	55.799	Bandung Kulon	61.274
4	Bandung Kulon	44.132	Bandung Kulon	52.967	Kiaracondong	55.016
5	Batununggal	40.709	Batununggal	50.949	Batununggal	52.226
6	Sukajadi	35.828	Andir	43.318	Andir	43.198
7	Coblong	34.826	Sukajadi	41.754	Sukajadi	41.456
8	Andir	30.950	Cibeunying	40.989	Cibeunying	41.304
9	Cibeunying	29.329	Coblong	39.987	Coblong	40.038
10	Bojongloa Kidul	29.858	Ujung Berung	34.544	Cicendo	31.727

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung (diolah oleh peneliti)

Dengan latarbelakang tersebut menunjukkan bahwa meskipun program Padat Karya sebagai salah satu program yang berupaya membantu menaikkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan sementara telah direalisasikan, dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan belum signifikan.

Dalam setiap pelaksanaan program pemerintah, evaluasi memegang peranan penting sebagai instrumen untuk menilai efektivitas dan relevansi program terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya evaluasi yang menyeluruh, program akan sulit diukur keberhasilannya, serta berisiko tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan Program Padat Karya, di mana keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan teknis semata, tetapi juga oleh sejauh mana program tersebut dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Evaluasi menjadi penting untuk memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan dapat beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Program Padat Karya sejatinya bertujuan menjadi solusi atas persoalan struktural seperti pengangguran, kemiskinan, dan masalah lingkungan, dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai kegiatan produktif, seperti pembersihan lingkungan atau pemeliharaan fasilitas umum. Namun, tujuan ini tidak akan tercapai bila pelaksanaannya tidak dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana program ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah seperti Kelurahan Cicaheum yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan lingkungan. Dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh aspek program mulai dari perencanaan, pelibatan peserta, hingga dampak yang dihasilkan. Pemerintah dapat memastikan bahwa implementasi program benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Evaluasi yang baik harus mampu menelusuri alur program secara menyeluruh dari sisi *context*, *input*, *process* dan *product* yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan hal tersebut peneliti tertarik membuat penelitian dengan

judul “Evaluasi Program Padat Karya Di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Permasalahan tersebut mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, kondisi lingkungan, serta efektivitas implementasi program yang belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum telah dilaksanakan, namun belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Kondisi lingkungan, khususnya sungai Ciparungpung, masih tercemar akibat penumpukan sampah meskipun program mencakup kegiatan pembersihan sungai.
3. Tingkat kemiskinan di Kota Bandung, termasuk di Kecamatan Kiaracondong, masih relatif tinggi dan menunjukkan fluktuasi, sehingga manfaat program belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat miskin dan rentan.
4. Kecamatan Kiaracondong termasuk salah satu wilayah dengan jumlah penerima bantuan sosial (DTKS) tertinggi di Kota Bandung, yang menunjukkan tingginya beban sosial ekonomi.
5. Belum ada evaluasi menyeluruh yang menilai efektivitas Program Padat Karya dari aspek context, input, process, dan product, sehingga keberhasilan program sulit diukur secara objektif.

C. Rumusan Masalah

Dengan latarbelakang penelitian yang telah disusun, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi *context* program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung?
2. Bagaimana evaluasi *input* program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung?
3. Bagaimana evaluasi *process* program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung?
4. Bagaimana evaluasi *product* program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang diharapkan bisa tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil evaluasi program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung berdasarkan evaluasi *context*.
2. Untuk mengetahui hasil evaluasi program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung berdasarkan evaluasi *input*.
3. Untuk mengetahui hasil evaluasi program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung berdasarkan evaluasi *process*.

4. Untuk mengetahui hasil evaluasi program Padat Karya di Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung berdasarkan evaluasi *product*.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Kegunaan tersebut berupa:

1. Manfaat Teoretis

- 1) Dengan penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemikiran baru dalam bidang Administrasi Publik.
- 2) Dari hasil penelitian yang dihasilkan ini diharapkan dapat menjadi referensi bermanfaat bagi para akademisi serta menjadi panduan untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan intelektual dan memperluas ilmu pengetahuan peneliti.

- 2) Bagi lembaga terkait

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang program Padat Karya. Hasil analisis akan memberikan informasi yang berharga bagi lembaga terkait dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, lembaga dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih efektif, merumuskan strategi perbaikan, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk program-program yang berkelanjutan.

- 3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana program Padat Karya berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi lokal dan lingkungan ditingkat masyarakat. Informasi

yang diperoleh dari analisis program pemerintah akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang efektivitas program tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam perencanaan dan implementasi program-program yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perbaikan kualitas hidup dan lingkungan di Kota Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah suatu konsep atau model yang digunakan untuk mengorganisir dan mengarahkan pemikiran dalam suatu penelitian atau analisis. Kerangka Berpikir dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan. Kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai sebuah model konseptual yang membahas dan memberikan kaitan antara teori dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu yang signifikan (Sugiyono, 2019).

Sementara dalam pandangan McGaghie kerangka berpikir merupakan suatu proses penyusunan yang membimbing perumusan pertanyaan dalam penelitian, serta mendorong penelitian terhadap masalah yang merinci konteks dan permasalahan yang menjadi fokus studi peneliti (Hayati, 2020). Kemudian kerangka berpikir juga dapat merujuk pada suatu penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih dalam pelaksanaannya (Haryoko et al., 2020). Dengan demikian, kerangka berpikir mengandung informasi mengenai variabel-variabel yang akan dikaji dalam penelitian, dan variabel tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan penelitian.

Dengan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau model yang membimbing dan mengarahkan pemikiran dalam penelitian atau analisis. Fungsinya mencakup identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, serta pembentukan kesimpulan. Kerangka Berpikir juga mencakup model konseptual yang mengaitkan teori dengan faktor-faktor yang diidentifikasi

Dengan konsep seperti itu maka peneliti dapat menyusun kerangka berpikir dimulai dari teori paling dasar yakni administrasi publik yang akan menjadi *grand theory* dalam penelitian ini.

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana kebijakan dan program pemerintah dijalankan secara efektif dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, administrasi publik sangat erat kaitannya dengan ilmu manajemen karena keduanya sama-sama menekankan pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Keterkaitan ini terlihat jelas dalam pengelolaan organisasi publik yang menuntut efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Nicholas Henry menyatakan bahwa inti dari disiplin administrasi publik terletak pada teori organisasi, manajemen, serta seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan urusan publik (Sujarwoto, 2009).

Dengan mengetahui bahwa administrasi publik memiliki keterkaitan dalam manajemen, Henry menyatakan administrasi publik memiliki tiga aspek utama, yaitu (Keban, 2014):

1. Organisasi publik, yang secara pokok terkait dengan struktur dan perilaku birokrasi
2. Manajemen publik, yang berkaitan dengan sistem, evaluasi, anggaran, dan manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi, yang melibatkan aspek kebijakan publik, privatisasi, hubungan antar pemerintah, dan etika birokrasi.

Shafritz dan Russel dalam (Keban, 2014) mengenai cakupan administrasi publik dengan mempertimbangkan sejumlah unsur, yakni:

1. lingkungan politik dan budaya
2. Implementasi konsep reinventing government
3. Hubungan antar lembaga pemerintahan
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
5. Perilaku organisasi
6. Managerialisme dan manajemen kinerja
7. Manajemen strategis sektor publik
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja
10. Keadilan sosial
11. Manajemen keuangan

12. Auditing, akuntansi, dan evaluasi
13. Penghargaan dan etika.

Kerangka Berpikir adalah suatu konsep atau model yang digunakan untuk mengorganisir dan mengarahkan pemikiran dalam suatu penelitian atau analisis. Kerangka Berpikir dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan. Kerangka berpikir dapat dijelaskan sebagai sebuah model konseptual yang membahas dan memberikan kaitan antara teori dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu yang signifikan (Sugiyono, 2019).

Sementara dalam pandangan McGaghie kerangka berpikir merupakan suatu proses penyusunan yang membimbing perumusan pertanyaan dalam penelitian, serta mendorong penelitian terhadap masalah yang merinci konteks dan permasalahan yang menjadi fokus studi peneliti (Hayati, 2020). Kemudian kerangka berpikir juga dapat merujuk pada suatu penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih dalam pelaksanaannya (Haryoko et al., 2020). Dengan demikian, kerangka berpikir mengandung informasi mengenai variabel-variabel yang akan dikaji dalam penelitian, dan variabel tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam tulisan penelitian.

Dengan ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu konsep atau model yang membimbing dan mengarahkan pemikiran dalam penelitian atau analisis. Fungsinya mencakup identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, serta pembentukan kesimpulan. Kerangka Berpikir juga mencakup model konseptual yang mengaitkan teori dengan faktor-faktor yang diidentifikasi

Dengan konsep seperti itu maka peneliti dapat menyusun kerangka berpikir dimulai dari teori paling dasar yakni administrasi publik yang akan menjadi *grand theory* dalam penelitian ini.

Administrasi publik merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana kebijakan dan program pemerintah dijalankan secara efektif dalam kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, administrasi publik sangat erat kaitannya dengan ilmu manajemen karena keduanya sama-sama menekankan

pada proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Keterkaitan ini terlihat jelas dalam pengelolaan organisasi publik yang menuntut efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Nicholas Henry menyatakan bahwa inti dari disiplin administrasi publik terletak pada teori organisasi, manajemen, serta seluruh aspek yang berkaitan dengan pengelolaan urusan publik (Sujarwoto, 2009).

Dengan mengetahui bahwa administrasi publik memiliki keterkaitan dalam manajemen, Henry menyatakan administrasi publik memiliki tiga aspek utama, yaitu (Keban, 2014):

1. Organisasi publik, yang secara pokok terkait dengan struktur dan perilaku birokrasi
2. Manajemen publik, yang berkaitan dengan sistem, evaluasi, anggaran, dan manajemen sumber daya manusia
3. Implementasi, yang melibatkan aspek kebijakan publik, privatisasi, hubungan antar pemerintah, dan etika birokrasi.

Shafritz dan Russel dalam (Keban, 2014) mengenai cakupan administrasi publik dengan mempertimbangkan sejumlah unsur, yakni:

1. lingkungan politik dan budaya
2. Implementasi konsep reinventing government
3. Hubungan antar lembaga pemerintahan
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
5. Perilaku organisasi
6. Managerialisme dan manajemen kinerja
7. Manajemen strategis sektor publik
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja
10. Keadilan sosial
11. Manajemen keuangan
12. Auditing, akuntansi, dan evaluasi
13. Penghargaan dan etika.

Dengan kedua teori yang dijelaskan tersebut, Keban membentuk dimensi administrasi publik secara lebih ringkas dengan menyebutkan bahwa dimensi administrasi publik yang memiliki keterkaitan dengan manajemen adalah sebagai berikut (Keban, 2014):

1. Dimensi Kebijakan, dalam hal ini pemerintah berhak melakukan hal yang dilakukan dan tidak dilakukan.
2. Dimensi Struktur Organisasi, pemerintah harus membentuk organisasi dengan cara dibentuk struktur dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah akan melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien.
3. Dimensi Manajemen, dalam hal ini prinsip-prinsip manajemen harus diterapkan dalam pengimplementasian program-program pemerintah.
4. Dimensi Etika, dalam hal ini dibentuk kode etik administrator sehingga administrator dalam melakukan kegiatannya tidak melanggar etika dan norma yang berlaku.
5. Dimensi Lingkungan, dalam hal ini menyangkut hal-hal eksternal seperti keadaan social, politik, budaya dll.
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja, hal ini berkaitan dengan apakah administrator bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya lewat laporan kinerja.

Dengan melihat dimensi-dimensi tersebut, dapat terlihat bahwa terdapat Dimensi Manajemen yang merupakan bagian dari administrasi publik. Telah dijelaskan bahwa setiap fungsi manajemen harus diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan supaya terwujudnya efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi-fungsi manajemen menjadi penting dalam menganalisis dan mengevaluasi administrasi publik secara menyeluruh.

Dalam Dimensi Manajemen memiliki fungsi-fungsi manajemen menurut (Siagian, 2017) yakni:

1. *Planning* (Perencanaan): Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan cara-cara strategis untuk mencapainya agar kegiatan organisasi dapat berjalan terarah dan efektif.
2. *Organizing* (Pengorganisasian): Pengorganisasian merupakan penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas secara sistematis agar setiap unsur bekerja sesuai fungsinya.
3. *Motivating* (Pergerakan): Motivasi adalah usaha untuk mendorong, membimbing, dan menggerakkan anggota organisasi agar bekerja dengan semangat dan produktifitas tinggi.
4. *Controlling* (Pengawasan): Pengawasan adalah proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

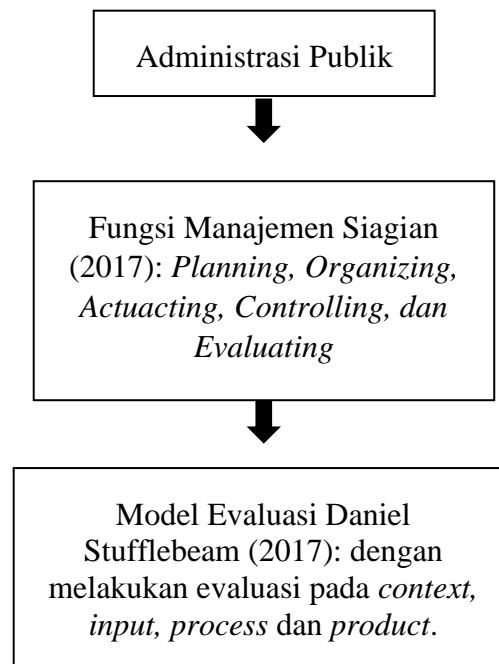
5. *Evaluating* (Evaluasi): Evaluasi adalah kegiatan menilai hasil kerja dan kinerja untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai serta menentukan langkah perbaikan.

Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu rencana, dengan mengukur hasil pelaksanaan secara objektif dan menggunakan ukuran yang dapat diterima oleh pihak yang mendukung atau tidak mendukung perencanaan tersebut.

Dalam fokus penelitian ini evaluasi yang dilakukan adalah mengenai evaluasi program. Evaluasi program merupakan suatu bagian dari tahap yang dilakukan setelah program diimplementasikan dengan baik untuk melihat sejauh mana sebuah perencanaan telah berhasil direalisasikan.

Dengan melihat teori-teori yang ada, peneliti mengambil teori yang berkaitan dengan evaluasi. Model CIPP dijadikan oleh peneliti sebagai model pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi dari subjek penelitian. Model CIPP dipilih karena pendekatannya dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari lini sebelum dilakukan program hingga program selesai dilaksanakan. Dapat dilihat bahwa dengan model CIPP yang merujuk pada analisis dalam segi *context*, *input*, *process* dan *product* dilakukan secara menyeluruh dan mendalam.

Setelah mengetahui bahwa kerangka berpikir terdiri dari berbagai teori yang disatukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari teori administrasi publik sebagai *grand theory* dan fungsi manajemen oleh S.P Siagian sebagai *middle range theory* yang menjelaskan secara umum mengenai cakupan dalam fenomena yang akan diteliti. Selanjutnya pada *applied theory*, peneliti memakai teori evaluasi dari Daniel Stufflebeam untuk mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dievaluasi. Untuk mempermudah pembaca dalam mencerna mengenai kerangka berpikir dalam penelitian ini, peneliti telah membentuk bagan yang dijabarkan berikut ini:



Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti

